

IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PAPUA

Roy Eka Pribadi¹
Nim. 1002045211

Abstract

Efforts to Improved the quality of education has been done by the Indonesian government in Papua province through Sustainable Development Goals (SDGs). The purpose of this study is to analyzed the implementation of SDGs in improved the quality of education in Papua. Researched used the concept of program implementation and quality of education in analyzied the implementation of SDGs in improved the quality of education in Papua. The implementation of SDGs in Papua resulted in several programs included Sekolah Satu Atap (SATAP), Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, Tertinggal (SM3T), and Baca, Tulis, Hitung (calistung). These program was implemented to improve the quality of education in Papua.

Keywords : *Education Quality, Papua, SDGs*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap masyarakat di suatu negara, karena pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu. Di dalam kondisi apapun masyarakat tidak akan bisa menghindari pengaruh dari penerapan pendidikan itu sendiri. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meingkatkan sumber daya manusia dikarenakan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan bangsa dan bukan saja berpengaruh terhadap produktifitas tetapi juga berpengaruh terhadap fasilitas masyarakat, dalam hal ini menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap akan menghadapi perubahan yang mana pendidikan secara luas yaitu proses pembelajaran di mana saja.

Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi hambatan-hambatan utama dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hambatan itu adalah adanya masalah mengenai kurangnya biaya dan fasilitas yang digunakan, artinya masalah yang dihadapi adalah kurangnya anggaran pendidikan, hambatan yang tidak bersifat material seperti semangat serta niat untuk sekolah yang kurang dan malas belajar meskipun adanya penambahan anggaran oleh pemerintah. (C.E Beeby:2003). Otonomi khusus diberlakukan di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 merupakan kebijakan yang bernilai strategis dalam peningkatan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: roy.ijonk@gmail.com

pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat Papua, karena itu diharapkan menjadi peningkatan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang pendidikan pemerataan pendidikan mencakup *equality* (persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan) dan *equity* (keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan). akses pendidikan disebut merata jika semua penduduk usia sekolah, telah mendapat kesempatan menikmati pendidikan dan disebut adil jika kelompok dalam masyarakat dapat menikmati pendidikan secara merata. (<http://elib.pdii.lipi.go.id>)

Permasalahan pendidikan terutama pendidikan di daerah Papua pada umumnya yang mana masyarakat pasti akan berasumsi bahwa masalahnya adalah infrastruktur namun kenyataannya ini adalah asumsi yang salah dimana Papua memiliki banyak gedung sekolah. Setiap daerah terpencil di Papua seperti daerah-daerah yang berada di pegunungan tengah Papua sudah memiliki gedung sekolah dan bentuknya adalah bangunan baru. (<https://www.academia.edu/6612667>)

Sustainable Development Goals dianggap layak atau lebih baik dari *Millenium Development Goals* yaitu SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan programnya. Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan SDGs yang mana pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap tujuan-tujuan yang masih tertinggal sekaligus terhadap orientasi-orientasi strategis tujuan pembangunan global berkelanjutan di mana yang menjadi target pembangunan berkelanjutan ini adalah provinsi Papua. SDGs mempunyai tantangan yang sangat besar dalam melakukan pembangunan berkelanjutan terutama di bidang peningkatan kualitas pendidikan di Papua yang mana dalam hal ini penulis melihat bahwa permasalahan pendidikan di Papua ini bukanlah permasalahan yang baru dihadapi oleh pemerintah. (<http://www.neraca.co.id/article/61170/>)

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Implementasi Program

Menurut *Pressman* dan *Wildavksy* implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Implementasi dipandang luas yang mempunyai makna pelaksanaan undang-undang, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program. (Parson:2001)

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

- a. Pengorganisasian
- b. Interpretasi
- c. Penerapan atau Aplikasi

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program. Korten menyatakan dalam suatu program akan berhasil bila jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu:

- a. Kesesuaian antara program dan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian anatara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. (Akib & Tarigan:2008)

Konsep Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogike”. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “pais” yang berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku membimbing”. Jadi paedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut “paedagogos”. (Soedomo:2008)

Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld bahwa:

- a. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
- b. Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.
- c. Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003>)

Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekloah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademik. Dapat pula prestasi di bidang lain seperti cabang olahraga, seni dan keterampilan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan kebersihan. Ada beberapa pengertian tentang hal yang berkaitan dengan kualitas pendidikan:

1. Indikator Kualitas Pendidikan

Menurut Nanang Hanifah dan Cucu Suhana dalam bukunya konsep strategi pembelajaran, bahwa indikator dalam suatu pendidikan adalah mencakup input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Seperti terurai berikut ini:

- a. Input sumber daya, meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumber daya lainnya (peralatan, perlengkapan, uang dan bahan
- b. Input perangkat lunak, meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana dan program.
- c. Input harapan-harapan, berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.

Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu tinggi rendahnya suatu input dapat diukur dari tingkat kesiapan Proses dapat dikatakan bermutu tinggi jika pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang dan peralatan) dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendinging motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Evaluasi pun harus menjadi proses yang berkelanjutan dan tidak boleh ditinggal sampai akhir studi. Hasilnya harus dibicarakan dengan murid dengan tujuan untuk melengkapi hasil evaluasi. Sifat melibatkan seluruh elemen akan sangat membantu dalam membangun kecakapan analitis para pelajar. Kualitas dalam konteks pendidikan adalah mengacu pada prestasi yang dicapai oleh anak didik atau sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi 18 yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, (misalnya ukangan umum, UAS, EBTA dan UNAS). Dapat pula prestasi dibidang lain, seperti prestasi disuatu cabang olahraga, seni atau ketrampilan tambahan tertentu. (Hanfiah & Cucu:2009)

Sedangkan menurut PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membanun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal setelah sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

- a. Standar isi
- b. Standar proses
- c. Standar kompetensi lulusan,
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- e. Standar sarana prasarana
- f. Standar pengelolaan
- g. Standar pembiayaan
- h. Standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4). (Suharsaputra:2010)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan

Kualitas yang dicapai oleh siswa atau suatu pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang datang dari dalam maupun dari luar, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Sumber daya
- b. Pertanggung jawaban (accuantability)
- c. Kurikulum
- d. Personil sekolah (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI:2009)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan Implementasi SDGs dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaan pustaka, baik melalui buku-buku jurnal, majalah, tulisan ilmiah, dan akses internet yang dinilai relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisa ini yang menjelaskan dan menganalisis data hasil penelitian yang telah dibaca dan dirangkum dari sumber tertulis yang berhasil diperoleh, dan kemudian menyajikan hasil penelitian tersebut dalam suatu penelitian.

Hasil Penelitian

Kondisi Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan di Indonesia bahkan di seluruh negara adalah hal yang paling penting dikarenakan menjadi hal yang dasar yang sangat penting untuk menciptakan generasi dengan kualitas yang baik. Negara maju didukung oleh sumber daya manusia yang bermutu. Jika kita lihat, kondisi di Indonesia masih saja memprihatinkan baik dari segi sarana maupun prasarana, bahkan di daerah-daerah yang jauh dari Ibukota ada bangunan sekolah yang tidak layak digunakan, hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Selain sarana dan prasarana ada juga sistem yang dianut di Indonesia yaitu sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk membentuk sejumlah kemampuan manusia di Indonesia dalam berbagai tingkat usia dan golongan yang meliputi kemampuan kepribadian dan moralitas, kemampuan intelektual, kemampuan sosial kemasyarakatan, kemampuan vokasional, kemampuan jasmani dan kemampuan-kemampuan lainnya. Sistem pendidikan nasional merupakan holistik dari komponen-komponen yang saling berkaitan secara terpadu buat mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan dari sistem pendidikan nasional berdasarkan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tujuan tersebut belum mencapai sasaran yang ditetapkan pemerintah melalui program-program pendidikan setiap tahunnya. Padahal tujuannya menjadi bagian krusial dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari fungsinya yaitu berperan dalam mengembangkan kemampuan serta membentuk watak/karakter maupun peradaban bangsa bermartabat guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Rumusan konstitusional tersebut apabila dicermati menegaskan bahwa arah dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani rohani, cakap, berilmu, dan kreatif, mengembangkan kemandirian serta menjadi warga negara yang baik. Ini semua dalam rangka membangun watak bangsa yang beradab dan bermartabat. Rumusan tujuan tersebut sangat ideal dan komprehensif, bahkan bisa dikatakan yang terlengkap di dunia. Rumusan tujuan tersebut adalah untuk memberikan suasana kebatinan dan semangat serta motivasi bagi setiap komponen manusiawi yang terkait dan terus berusaha untuk mencapai cita-cita yang ideal itu.

Dijelaskan pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, butir 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi menurut amanat UU No. 20 Tahun 2003 ini, peserta didik harus didorong untuk aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang kuat, akhlak yang mulia serta ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan yang implikasinya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296045/>).

Kurikulum lebih dari sekedar *textbook*, lebih dari *subject-matter*, lebih dari rangkaian pelajaran, bahkan lebih dari sekedar pelajaran kursus yang mana adalah situasi dan kondisi untuk mengubah sikap peserta didik yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kurikulum harus bersifat fleksibel dan elastis sehingga terbuka kesempatan untuk memberikan bahan pelajaran yang penting dan perlu bagi anak didik. Elastisitas kurikulum ini tentu saja disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Adapun tujuan spesifik dari kurikulum adalah menumbuhkan rasa toleransi, kesanggupan untuk berpikir sederhana, dan mengikis prasangka dalam memberikan pertimbangan nilai atau *value judgements*. Selain itu, kurikulum juga berfungsi untuk membantu kematangan pribadi peserta didik, membantu siswa agar berhasil menyesuaikan diri dengan masyarakat sekolahnya, serta membantu siswa agar menyadari kepentingan masyarakat dan menghayati masyarakatnya sendiri. Tujuan kurikulum lainnya adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak didik sehingga bisa memahami kompleksitas lingkungan sosial dan peradabannya, serta menanamkan nilai, sikap, dan kemampuan untuk belajar.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih harus ditingkatkan. Pemerintah harus lebih siap untuk meningkatkan kualitas pendidikan, begitu juga guru dan siswa dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan dapat bersaing dengan negara-negara maju dengan lebih baik. Data mengenai pendanaan pendidikan Indonesia terhitung paling rendah dibandingkan Negara-negara di Uni Eropa dana pendidikannya 5% PDB (Produk Domestik Bruto), Belanda 7% PDB, Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8% PDB, Filipina 3,4% PDB, Thailand 5% PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, Jepang 7% PDB, dan Indonesia hanya 1,4% PDB¹⁸ mengacu data ini

artinya pemerintah Indonesia tidak benar-benar peduli pada pendidikan untuk memajukan bangsa. (<http://www.rumahbangsa.net/2014/07/>)

UU No.20/2003 pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu”, dan pasal 12 ayat (1) mengatakan “setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya”. Agar dapat melaksanakan pendidikan bermutu dan melaksanakan pendidikan sesuai minat, bakat dan kemampuan siswa, maka penyiapan guru profesional tidak bisa ditawar-tawar lagi, tetapi suatu keharusan. Maka untuk menyiapkan guru profesional, persyaratan utama untuk dapat diterima sebagai mahasiswa calon guru harus dari mereka yang tergolong dalam kelompok 20% teratas lulusan SMA dengan nilai matematika minimal 6. Agar guru profesional benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai pendidik profesional, maka mereka harus mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan martabatnya sebagai guru profesional.

Kebijakan sertifikasi guru, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional. Namun beberapa indikasi menunjukkan kebijakan sertifikasi guru gagal menjadikan guru menjadi profesional. Ini terjadi karena guru yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan sertifikasi, setelah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terlihat tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersertifikat. Oleh karena itu berkaitan dengan sertifikasi dipandang perlu untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan kebijakan sertifikasi sehingga sejalan dengan tujuan penciptaan proses pembelajaran bermakna yang bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan sesuai mukadimah UUD 1945. (<http://educ.utm.my/wp-content/uploads/2013/11/35.pdf>)

Selain kurikulum ada unsur lain dalam pendidikan yaitu media pembelajaran yang mana buku pelajaran menjadi yang paling efektif digunakan untuk media pembelajaran. Buku pelajaran merupakan salah satu komponen pendukung dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran tersebut buku pelajaran menjadi sumber belajar utama yang dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Buku pelajaran disebut buku teks merupakan buku yang dirancang dengan cermat oleh para pakar atau para ahli dalam bidang tertentu dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi untuk digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas.

Dalam implementasi Kurikulum 2013, pemerintah telah menyiapkan buku teks pegangan guru dan buku teks pegangan siswa. Buku-buku tersebut wajib digunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Akan tetapi, sesuai kenyataan yang ada saat ini, pendistribusian buku pelajaran yang dimaksud belum sepenuhnya merata. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum memperoleh buku pelajaran, sebagian besar sekolah-sekolah tersebut berada di pelosok-pelosok terpencil.

Buku teks pegangan siswa sebagai salah satu dari buku-buku wajib yang disiapkan dalam implementasi Kurikulum 2013, buku teks pegangan siswa memiliki banyak peran. Salah satunya adalah sebagai pemandu secara teknis dan langkah-langkah

operasional untuk menelusuri secara teliti menuju pembentukan kompetensi secara tuntas. Sebagai pemandu secara teknis hendaknya buku teks pegangan siswa benar-benar dipahami isinya oleh peserta didik. Akan tetapi, berdasarkan perbincangan dengan seorang guru mengenai implementasi Kurikulum 2013, dalam hal ini guru terdapat masalah mendasar dari para guru yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terhadap isi buku teks pegangan siswa yang digunakan dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa isi buku teks pegangan siswa belum sepenuhnya dipahami oleh peserta didik.

Dalam penyusunan buku teks pegangan siswa tentu berbeda dengan penyusunan buku teks lainnya yang dimanfaatkan dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan konsep kurikulum sebelumnya berbeda dengan konsep Kurikulum 2013. Buku teks pegangan siswa dalam Kurikulum 2013 menyuguhkan isi buku yang didalamnya mengusung kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar perfomansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. (<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296045>)

Dalam pembangunan infrastruktur, sarjana dari pendidikan akademik maupun vokasi sangat diperlukan untuk mendukung setiap tahapan pembangunan. Peran sarjana dalam pembangunan infrastruktur terkait dengan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan pembangunan infrastruktur. Dalam tahap perencanaan (*planning*) infrastruktur diperlukan sarjana dari berbagai disiplin ilmu tidak saja dari disiplin ilmu yang langsung terkait seperti teknik sipil, planologi, dan geomatika, tetapi juga sarjana dalam disiplin ilmu lingkungan, ekonomi, manajemen, bahkan sosial. Kerjasama lintas disiplin ilmu tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan yang dihasilkan telah melalui kajian multi dimensi. Tahap perencanaan biasanya memerlukan kemampuan imajinasi yang tinggi, menggambarkan suatu karya infrastruktur yang tadinya belum ada menjadi suatu rencana untuk dilaksanakan. Dalam perencanaan tersebut, seorang sarjana haruslah sensitif dengan lingkungan baik alam maupun sosial.

Seorang perencana dituntut untuk memberikan hasil perencanaan yang berdaya guna optimal, memberi keuntungan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jangan sampai hasil perencanaannya menimbulkan dampak yang menyengsarakan masyarakat, dampak negatif dari perencanaan harus diminimalkan. Oleh karena itu, dalam pendidikan akademik maupun vokasi mahasiswa hendaknya dibuka wawasannya, diasah daya cipta dan kreativitasnya di samping empati dan kepekaannya pada lingkungan dan kepentingan masyarakat. Karena nantinya mereka akan bekerja dalam kelompok maka sejak di bangku kuliah hendaknya mahasiswa telah dikenalkan dengan kerja lintas disiplin ilmu dalam kelompok. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, memimpin dan dipimpin merupakan kebutuhan mendasar agar seorang sarjana mampu dengan mulus masuk ke lapangan kerja. (<http://staffnew.uny.ac.id>)

Dari dulu hingga sekarang permasalahan infrastruktur ini masih menjadi masalah utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya

sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan untuk perbaikan sedangkan proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai. (<http://sosialitas.weebly.com/>)

Guru merupakan garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Untuk itu guru yang berkualitas harus dimiliki Indonesia agar tujuan pendidikan mampu direalisasikan dengan baik. Jika kita lihat kondisi guru dilapangan, maka hanya sedikit guru yang bisa dikatakan profesional. Hal ini dapat kita lihat dari data Ditjen PMPTK yang menyatakan bahwa, “Hingga 2007 tercatat baru 16,57 % guru SD yang berkualifikasi S-1 dan Guru SMP sebanyak 61,31 %. Dijenjang pendidikan menengah guru SMA yang berkualifikasi S-1 sebanyak 83,34 % dan SMK sebesar 77,53 %. (<https://www.academia.edu>)

Kondisi Pendidikan Di Papua

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sistem pendidikan di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Papua adalah 336,644 siswa. Akan tetapi angka tersebut hanya sebatas angka yang mana kondisi di lokasi pendidikan tersebut sangat jauh dari angka yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik tersebut.

Penerapan kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Papua, dalam hal ini akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum CBSA dan kurikulum lainnya yang mana penggunaan berbagai jargon dalam kurikulum nasional misalnya, siswa aktif, kompetensi, kewarganegaraan dan sebagainya tidak dilandasi dengan paradigma yang mantap dan relevan dengan konteks budaya dan lingkungan yang dapat membentuk siswa/-siswi dan mahasiswa-mahasiswi papua pada suatu mutu dan profesionalnya setempat.

Kurikulum 2013 telah diselenggarakan sejak tahun pertama program ini dicanangkan di semua tingkat pendidikan di Papua, yang terbagi dari 5 region yang ada di seluruh kabupaten. Lima region tersebut antara lain Jayapura, Merauke, Nabire, Biak, Wamena. Sudah puluhan ribu guru yang disebar, namun hanya sedikit dari mereka yang memiliki keterampilan khusus dari pelatihan tenaga pendidik yang dilaksanakan. Dari 26.933 guru yang tersebar di 28 kabupaten dan 1 kota, dari jumlah tersebut, sebanyak 16.094 orang menjadi guru sasaran untuk kurikulum 2013 ini. Namun kenyataan di lapangan, baru 5 ribu hingga 6 ribu guru, atau baru 30 persen yang terlatih. (<http://news.detik.com>)

Masalah pendidikan di papua sendiri adalah minimnya sumber daya guru atau tenaga pengajar yang mana tingkat ketidakhadiran guru di Papua mencapai rata-rata 82%, dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa guru-guru tersebut tidak hadir atau tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu dikarenakan para guru tersebut merasa tidak betah untuk mengajar di Papua serta jarak sekolah dan tempat tinggal guru sangatlah jauh seperti guru-guru di daerah pegunungan tengah Papua terutama di kabupaten Jayawijaya dan kabupaten Lanny jaya yang mana guru harus menempuh

perjalanan sekitar 10 km untuk mengajar sehingga hal inilah yang membuat guru-guru tersebut tidak betah mengajar di daerah Papua. (<http://www.beritasatu.com/pendidikan/296925>)

Di Kabupaten Jayawijaya, para guru lebih senang tinggal di Wamena. Alasannya beragam, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari kota, terbatasnya transportasi umum menuju tempat mengajar, mengurus berbagai administrasi sekolah, hingga sibuk mencari kerja sampingan. Guru di Papua harus bekerja ekstra menjadi orang tua murid ditengah ketidakpahaman dan ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak dikarenakan saat di rumah orang tua jarang memantau pendidikan anak mereka. Kurangnya perhatian orang tua juga dapat dilihat dari sikap orang tua yang mengabaikan pentingnya anak untuk mengikuti Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) dalam hal ini PAUD dan TK dianggap bukan sekolah padahal untuk saat ini anak sebelum masuk SD dituntut agar sudah bias membaca.

Dalam sistem masyarakat Pegunungan Tengah, anak diasuh kaum ibu. Saat hendak bekerja di ladang, para ibu mengajak anak-anak ke kebun. Tidak ada budaya mengantar anak sekolah, apalagi membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Kondisi itu diperparah dengan kurikulum pendidikan nasional yang sulit diterapkan dalam pendidikan di Papua. Guru juga sering kali kesulitan mencari padanan kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa ibu para siswa yang beragam, terkait nama-nama binatang. Beberapa suku memiliki padanan kosakata beberapa binatang berkaki empat, tetapi beberapa suku yang lain tidak punya. Suku tertentu menyebut semua binatang berkaki empat, mulai dari babi, kucing, anjing, maupun kambing, tanpa dibedakan. Belum lagi dialek beberapa suku yang saling bertukar dalam membunyikan konsonan, seperti "p" diucapkan "b", "j" dilafalkan "y", dan "s" berubah menjadi "t". Kondisi ini membuat banyak anak asli Pegunungan Tengah tidak lancar membaca meski sudah duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Kondisi itu melemahkan kemampuan siswa mengikuti pelajaran sesuai beban kurikulum. Guru lebih memilih mengulang-ulang pelajaran yang sudah disampaikan agar murid bisa ingat. Ini membuat proses pendidikan menjadi tidak efektif. (<http://edukasi.kompas.com/read/2011/06/15/03155227>)

Sustainable Development Goals

Pendidikan menjadi kunci dasar dari pembangunan sebuah negara itu sendiri. Sebuah negara tidak bisa berdiri tanpa adanya pendidikan, dimana masyarakatnya tidak bisa berkembang dan hanya akan dibodohi oleh negara lainnya. Oleh karena itu kita harus selalu memperhatikan dan mementingkan pendidikan di negara kita. Tidak hanya menyelenggarakan pendidikan saja, akan tetapi kita harus memperhatikan kualitas pendidikan dan aspek lainnya seperti infrastruktur pendidikan, kurikulum pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan lainnya yang mendukung keberhasilan sebuah pendidikan. Karena dalam melaksanakan sebuah pendidikan dibutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun non fisik, persiapan fisik yang dimaksudkan adalah kesiapan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah dan lainnya.

Sedangkan persiapan non fisik adalah kemampuan guru, kurikulum yang digunakan, psikologi anak dan lainnya. Kedua aspek ini harus terpenuhi guna menunjang

pelaksanaan pendidikan yang maksimal dan berkualitas. Dalam hal ini persoalan pendidikan dan berbagai macam pembangunan berkelanjutan telah dibahas dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah menegaskan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara yang hadir, termasuk wakil presiden Yusuf Kalla yang turut mengesahkan agenda pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia. Mulai tahun 2016, *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara resmi menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs). (infid.org/wp-content/uploads/2015)

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut adalah Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi, Energi Bersih dan Terjangkau, Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, Industri Inovasi dan Infrastruktur, Mengurangi Kesenjangan, Keberlanjutan Kota dan Komunitas, Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, Aksi Terhadap Iklim, Kehidupan Bawah Laut, Kehidupan di Darat, Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Menyikapi 17 Tujuan Global tersebut, Presiden Majelis Umum PBB menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah setempat juga hanya akan berhasil dalam melaksanakan agenda besar ini jika adanya partisipasi luas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan seperti anggota parlemen, pemimpin daerah, masyarakat lokal, masyarakat sipil, pemuda, komunitas agama, serikat buruh, pelaku bisnis dan akademisi di seluruh dunia. (<http://www.4muda.com/mengenal-17-tujuan-global-global-goals-sebagai-kelanjutan-dari-tujuan-pembangunan-millenium-millenium-development-goals/>)

Pendidikan dewasa ini merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif.

Dalam dunia Internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara diseluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO

Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua (*Education for All Development Index, EDI*) Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru program pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,684. Dengan angka itu Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 62) dan Singapura (peringkat 11).

Berdasarkan hal diatas, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. (www.sdgsindonesia.or.id)

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Di Papua

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah melakukan dan menyusun beberapa program dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya mencapai program yang diturunkan dari Perserikatan Bangsa-bangsa yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang mana dalam upaya tersebut ada beberapa program yang dijalankan pemerintah untuk mencapai target dari SDGs tersebut hingga 2030. Program tersebut adalah Program Satu Atap (SATAP), Sarjana Mendidik di daerah terdepan terluar tertinggal (SM3T), program Indonesia mengajar, Program baca, tulis, hitung (Calistung) program-program tersebut akan dibahas dalam beberapa poin yang telah dijabarkan .

1. Program Satu Atap (SATAP)

Program manajemen berbasis sekolah yang diterapkan di sekolah Satu Atap (SATAP) adalah program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia demi membuka peluang bagi anak-anak yang kurang beruntung atau kurang mampu untuk dapat mengecap pendidikan dasar yaitu sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama.

Tujuan umum dari program ini adalah mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Sedangkan tujuan khususnya adalah: Memperluas layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir guna menunjang tercapainya penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun. Mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya, serta memberikan kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

UNICEF juga saat ini sedang melaksanakan Program Sekolah Satu Atap (SATAP) di 120 sekolah di seluruh Tanah Papua (provinsi Papua dan Papua Barat) dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF sepanjang 2011- 2015 yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) dari Pemerintah

Australia. Tujuannya adalah untuk menguji efektif dan pendekatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan hasil belajar keaksaraan di kelas awal. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik di mana anak-anak tetap dan berhasil dalam studi mereka.

2. Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan Terluar Tertinggal (SM3T)

Program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal (SM3T) adalah program Kemenristek Dikti yang mana program ini disandingkan dengan Program Profesi Guru (PPG), karena PPG akan langsung oleh tiap peserta SM3T sebagai bonus pengabdian dalam membantu mencerdaskan kehidupan di daerah terdepan, terluar, tertinggal.

Selain mengajar dikelas guru-guru dari SM3T ini juga membuka kelas calistung setelah jam pelajaran berakhir dan kelas calistung tersebut dilaksanakan di mess ataupun rumah tinggal dari guru SM3T tersebut. Dalam hal ini perjuangan tenaga pendidik menjadi tombak utama dalam mencerdaskan kehidupan di Papua serta menjadi aktor dari pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Papua dalam mencapai Sustainable Development Goals. Dengan kemampuan akademis yang ada pada guru-guru SM3T diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat Papua itu sendiri, bukan hanya pendidikan formal ataupun akademis dapat diajarkan oleh guru-guru ini melainkan pengetahuan tentang kehidupann sehari-hari seperti mengajarkan tentang penggunaan pasta gigi, sabun, beternak, komputer, pertanian dan berbagai macam keterampilan lainnya yang dapat di berikan kepada masyarakat Papua terutama di pegunungan tengah yang mana masih jauh dari kata sejahtera.

3. Program Baca, Tulis, Hitung (Calistung)

Calistung adalah singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung dimana calistung merupakan dasar tahapan orang bisa mengenal huruf dan angka. Banyak pakar menganggap pentingnya calistung untuk mempermudah komunikasi dalam bentuk baca, tulis, dan angka dikarenakan calistung ini banyak didapat dalam pendidikan formal.

Dalam penerapan program calistung ini pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Usaid Prioritas dalam mengembangkan buku paket kontekstual Papua (BPKP) yang mana buku ini merupakan media pembelajaran dalam membaca, tulis, hitung (calistung). BPKP ini disusun sesuai dengan kurikulum nasional Indonesia dan telah direkomendasikan oleh dinas pendidikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Papua untuk digunakan di seluruh Papua. Buku ini dikembangkan dengan materi yang terperinci, dan lengkap dengan penyesuaian kondisi di Papua. Buku ini menjadi pendahuluan bagi siswa di Papua sampai mereka mahir calistung sehingga dapat meneruskan pembelajaran dengan menggunakan buku paket nasional.

Hambatan-Hambatan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Papua

Pendidikan berkualitas memang menjadi tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) akan tetapi dalam mencapai pendidikan yang berkualitas tersebut tentu

memiliki beberapa hambatan-hambatan yang mana dalam hal ini penulis melihat ada tiga hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua adalah akses, mutu dan Adat Istiadat.

1. Akses

Kondisi geografis yang ada di Papua sangatlah rumit dimana para guru ataupun anak didik yang harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya dengan berjalan kaki seperti yang dilakukan guru ataupun anak didik yang ada di pegunungan tengah Papua.

2. Mutu

Kompetensi kualitas dan mutu tenaga pengajar di Papua sama tidak menggembirkannya dengan pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan dan kesejahteraan guru. Dari sisi infrastruktur hampir seluruh bangunan gedung sekolah di tanah Papua adalah peninggalan zaman colonial Belanda.

3. Adat Istiadat

Sisi budaya dan adat bisa saja menjadi hambatan dalam upaya dalam implementasi program SDGs dalam hal ini kehidupan adat di Papua sebagai contoh dimana anak laki-laki wajib membatu orangtua di kebun dan anak perempuan kerjanya di dapur serta ada peraturan adat yang mana hanya anak kepala suku saja yang boleh bersekolah dan memperoleh pendidikan.

Kesimpulan

Dalam penulisan ini juga penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pendidikan yang ada di Papua bukanlah semata mengenai kurangnya infrastruktur yang ada di Papua itu sendiri melainkan kualitas pendidikan yang ada di Papua seperti kualitas guru dan peserta didik yang masih belum mencapai tingkat yang berkualitas. Dalam hal ini Sustainable Development Goals (SDGs) menerapkan program yaitu Pendidikan Berkualitas yang mana dalam menjalankan program ini pemerintah Papua melakukan kerjasama dengan Organisasi lokal maupun internasional dimana ada beberapa program yang dijalankan guna mencapai pendidikan berkualitas ini, program tersebut adalah Program Sekolah Satu Atap (SATAP), Program Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan Terluar Tertinggal, Program Baca, Tulis, Hitung (Calistung).

Daftar Pustaka

Buku

- Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik.
- Beeby, C.E. 2003, *Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta:LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
- Hanafiah, Nanang. dan Cucu, Suhana. 2009. *Konsep Strategi Pembelajaran*. PT Refika Aditama. Bandung.

Soedomo, Hadi. (2008). *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

Suharsaputra, Uhar. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Dalam Analisis Kebijakan*, Jakarta:Kencana, 2001,

Media Internet

“Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)”, <http://www.definienda.com/2015/06/angka-partisipasi-kasar-apk-dan-angka.html> Diakses pada tanggal 2 September 2016

“*APK/APM PAUD, SD, SMP, SMA dan PT (termasuk madrasah dan sederajat) tahun 2013/2014*”, mengutip dari <http://kemdikbud.go.id/APM%.pdf> Di akses pada tanggal 25 Agustus 2016

“Calistung Perlu Diajarkan Pada Balita, Ini Caranya” mengutip dari <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/12/16/mxw53s-calistung-perlu-diajarkan-ke-balita-ini-caranya> diakses pada tanggal 27 April 2017

“Meneropong Sistem Pendidikan di Papua Bagian Satu”, mengutip dari https://www.academia.edu/6612667/Meneropong_Sistem_Pendidikan_di_Papua_Bagian_Satu Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016

“Papua dapat Bantuan Guru Calistung Dari Unicef” mengutip dari <http://rimanews.com/budaya/pendidikan/read/20150904/232478/Papua-Dapat-Bantuan-Guru-Calistung-dari-Unicef> diakses pada tanggal 27 April 2017

“Papua Target Utama Pembangunan Berkelanjutan Era Jokowi” mengutip dari <http://www.neraca.co.id/article/61170/papua-target-utama-pembangunan-berkelanjutan-era-jokowi> Diakses pada tanggal 2 November 2016

“*Pendidikan Dasar Dan Menengah*”, mengutip dari [http://file.upi.edu/Direktori/fip/jur_administrasi_pendidikan/195306121981031-udin_syaefudin_sa'ud/pendidikan_dasar_\(udin_sa'ud\).pdf](http://file.upi.edu/Direktori/fip/jur_administrasi_pendidikan/195306121981031-udin_syaefudin_sa'ud/pendidikan_dasar_(udin_sa'ud).pdf) diakses pada tanggal 19 april 2016

“Pengertian Calistung” mengutip dari <http://www.kampus-info.com/2012/03/pengertian-calistung.html> diakses pada tanggal 27 April 2017

“Pendidikan Masih Jadi Masalah Utama di Papua”, mengutip dari <http://www.beritasatu.com/pendidikan/393388-pendidikan-masih-jadi-masalah-utama-di-papua.html> diakses pada tanggal 18 Ferbruari 2017

“SATAP, Kemitraan Berkualitas Untuk Pendidikan” mengutip dari <http://scholae.co/web/read/513/satap.kemitraan.berkualitas.untuk.akses.pendidikan> diakses pada tanggal 23 April 2017

“Sekilas Papua” Mengutip dari <https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/> Diakses pada tanggal 29 September 2016

“SM3T atau CPNS, Mending Pilih Mana?” mengutip dari <http://www.asncpns.com/2014/06/sm3t-atau-daftar-cpns-mending-pilih-mana.html> diakses pada tanggal 25 April 2017

“Tanoto Foundation gandeng Unicef Bangun Sekolah Satu Atap” mengutip dari <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/02/13/njow30-tanoto-foundation-gandeng-unicef-bangun-sekolah-satu-atap> diakses pada tanggal 23 April 2017

“UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua”, mengutip dari <http://prokum.esdm.go.id/uu/2001/uu-21-2001.pdf> diakses pada tanggal 29 September 2016